

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penanaman Modal Dalam Negeri pada Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 – 2023, didapat hasil :

1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diantara tahun 2009 hingga 2023 tidak mendapat dampak dari Ketimpangan Pendapatan. Hal ini disebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata cenderung tidak menurunkan kemiskinan, tetapi dalam rentang tahun ini pengaruhnya tidak signifikan.
2. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2009 hingga 2023 mendapat dampak negatif dari Rata-Rata Lama Sekolah. Hal ini disebabkan pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan peluang kerja dan pendapatan, sehingga bisa meminimalisir kemiskinan.
3. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2009 hingga 2023 tidak mendapat pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini disebabkan oleh menciptakan kesenjangan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata diantara penduduk dengan ekonomi menengah keatas dan menengah kebawah. Terkait dengan hal itu, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, hal itu belum bisa sepenuhnya mengatasi kemiskinan.

4. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2009 hingga 2023 tidak mendapat pengaruh dari Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal ini disebabkan di Provinsi DI Yogyakarta Industri pariwisata dan jasa terus mendominasi, tetapi mereka tidak banyak menyerap tenaga kerja miskin. Terkait dengan hal itu, meskipun investasi membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, tetapi pengaruhnya pada kemiskinan masih lemah.

5.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat merancang dan memperkuat kebijakan yang mendukung redistribusi pendapatan, perbaikan kurikulum pendidikan, pembangunan infrastruktur ekonomi, dan regulasi investasi yang inklusif. Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan pajak progresif, program bantuan sosial berbasis data DTKS, perluasan wajib belajar 12 tahun, penguatan pendidikan vokasi, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, serta insentif bagi investasi yang menyasar wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
2. Penelitian di lain sisi, penelitian ini diharapkan bisa diperluas dengan menggunakan variabel lain yang lebih spesifik (variabel turunan) serta menggunakan sampel lebih besar agar hasilnya lebih representatif dan mengilustrasikan pengaruh secara lebih konkret.